

Diskursus Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Syafnil¹

¹Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
Jalan Situjuh Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, 25129

Email : Syafnil.017@gmail.com

Abstrak

Artikel ini ingin memperlihatkan dua sisi dalam upaya pemenuhan energi di Indonesia. Sisi pertama, Persoalan ketahanan energi selalu menjadi isu penting di banyak negara karena energi sangat di butuhkan untuk pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Persoalan dari sumber energi fosil yang umum dipakai sekarang ini banyak di perdebatkan oleh para ahli karena mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perdebatan itu memunculkan wacana untuk beralih sumber energi baru, khususnya energi yang bisa terbarukan. Sisi kedua, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. muncul berbagai pertanyaan pada masyarakat terdampak proyek pembangunan pembangkit listrik dengan metode energi terbarukan dan juga khalayak ramai. Pertanyaan seberapa ramah lingkungan nya energi terbarukan atautkah hanya mengikuti isu dan wacana global baru-baru tentang energi terbarukan. Atau hanya mengatasnamakan energi terbarukan. Wacana-wacana itulah yang akan diperdebatkan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi etnografi, khususnya etnografi kritis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif dan studi pustaka. Temuan artikel ini akan dibahas melalui sudut pandangan antropologi ekologi, khususnya dalam pandangan politik ekologi. Menarik untuk melihat wacana (lisan dan tulisan) dalam politik ekologi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas, program dan kebijakan yang diambil hanyalah wacana yang dikembangkan untuk mencapai kepentingan dari kelompok tertentu. Tulisan ini ingin menyampaikan tentang berkembangnya wacana tentang energi baru terbarukan sebagai suatu pembenaran. Pembenaran yang mengatasnamakan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan yang muncul akhir-akhir ini dalam kehidupan masyarakat, serta dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Wacana, Politik Ekologi, Energi Baru Terbarukan*

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini tidak ada negara yang benar-benar bebas dari alur modernisasi dan globalisasi. Semua negara di seluruh dunia bergerak dalam arus yang sudah di tentukan oleh wacana lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia, IMF, NGO internasional, dan negara-negara adidaya dengan mengatasnamakan keamanan global dan kesejahteraan. Banyak wacana yang mereka konstruksi, seperti ketahanan pangan, keamanan, kemanusiaan, pelestarian lingkungan, HAM, ketahanan energi fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan di seluruh dunia. Wacana-wacana tersebut juga merambah ke Indonesia, dengan munculnya kebijakan yang mengacu pada konstruksi tersebut sebagai pedoman.

Akhir-akhir ini, wacana tentang pemenuhan energi di Indonesia tidak lagi bergantung pada energi fosil. Pemenuhan energi mulai bergeser dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Wacana ini semakin populer kita dengar dan kita temukan di berbagai media dalam kehidupan kita. Istilah seperti, *back to nature, save energy, save world, go green, eco energy*, kampus hijau, gerakan 1 jam tanpa listrik dan lain-lain sebagainya. Penggunaan istilah yang ramah itu dengan warna yang didominasi hijau pada spanduk-spanduk, tidak saja bertujuan untuk membangun kesadaran tetapi juga mengajak kita untuk melestarikan lingkungan yang hijau, melindungi bumi dari pemanasan global dan tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada sisi lain, istilah-istilah

itu terkadang hanya sekadar wacana yang di tampilkan di dalam realitas kehidupan masyarakat sebagai bentuk legitimasi terhadap aktivitas yang mereka lakukan.

Istilah ini muncul pada banyak aspek, mulai dari produk industri yang memberi label produk mereka sehingga menarik di beli oleh orang-orang yang sudah tergugah oleh wacana-wacana istilah-istilah hemat energi tadi. Cara ini juga di lakukan oleh lembaga atau institusi kepentingan seperti pemerintah, NGO, Investor, Perusahaan dan lain sebagai nya. Pemerintah melalui alat-alat legitimasi seperti kebijakan nasional hingga daerah bahwa sudah seharusnya Indonesia melakukan tindakan hemat energi. Maka, energi baru terbarukan (EBT) di pilih karena dianggap energi baru di gunakan di Indonesia dan merupakan energi yang bisa terbarukan secara alamiah.

Energi baru terbarukan dianggap ramah lingkungan di banding energi fosil. Ramah lingkungan dikonsepsikan sebagai aktivitas dan produksi yang menekankan pada aspek pemanfaatan SDA, dimana pada seluruh aspek dan prosesnya mulai dari pengolahan, pemanfaatan, limbah, dan hasil yang tidak terpakai harus sedapat mungkin bisa di urai kembali oleh alam (Arifin, 2012). Oleh karena itu, energi baru dan terbarukan dianggap menjadi pilihan yang untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan melestarikan alam. Pada persoalan ini energi panas bumi yang menjadi pilihan karena menurut pemerintah energi ini potensial untuk di kembangkan. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2003, *Energi Panas Bumi (Geothermal Energy)* adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Energi panas bumi yang tersebar di 285 titik daerah sepanjang busur vulkanik dengan total potensi sebesar 29.215 GWe (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2011).

Menurut Laporan yang dikeluarkan oleh WWF pada tahun 2012 dengan judul “Igniting the Ring of Fire: A Vision for Developing Indonesia’s Geothermal Power” Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia, dengan setidaknya 29 Giga Watt total potensi panas bumi. Dari jumlah tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 1,2 Giga Watt. Pernyataan dari WWF dan Kementerian ESDM di dukung Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah telah berupaya menyusun strategi pengelolaan energi nasional 2006-2025, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam pasokan energi nasional harus dipenuhi 17% energi terbarukan.

Tulisan ini ingin memberi wawasan baru untuk memahami persoalan lingkungan yang sering kita dengan dan lihat di berbagai media, melalui sudut pandang ekologi politik. Tulisan ini juga ingin menunjukkan bagaimana politik ekologi terjadi di pada masyarakat dan reaksi mereka berusaha untuk membalik politik ekologi tersebut.

METODE

Pendekatan (*approach*) penelitian yang dipilih ialah pendekatan kualitatif. Strategi penelitian (*inquiry*) yang digunakan adalah etnografi. Menurut Harris (1968), Etnografi merupakan suatu desain kualitatif penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok berkebudayaan sama (dalam Creswell, 2013: 125). Dari beberapa tipe strategi penelitian, dipilih salah satunya. Strategi etnografi yang dipilih yakni

etnografi dengan pendekatan kritis (etnografi kritis). Etnografi kritis, salah satu tipe etnografi yang menggunakan pendekatan advokasi didalamnya. Etnografi kritis merupakan respons terhadap kondisi masyarakat sekarang ini, sebab sistem kekuasaan, prestise, privilese (hak istimewa), dan otoritas digunakan untuk memarginalkan individu/kelompok yang berasal dari kelas, ras, gender yang berbeda (Creswell, 2013:130). Thomas (1993) (dalam Creswell, 2013:130) juga menegaskan bahwa etnografi kritis adalah satu jenis riset etnografis yang mana para penulisnya memperjuangkan emansipasi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau dipinggirkan. Kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari sudut pandang politik ekologi. Peterson (2000:323-324) mengungkapkan bahwa “politik ekologi” merupakan suatu pendekatan, yang mana menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi dan dinamika antara lingkungan dan manusia, di dalam ruang lingkup antara bermacam-macam kelompok ditengah masyarakat mulai dari skala individu lokal hingga trans-nasional secara keseluruhan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Politik Ekologi: Sebagai Cara Pandang

Pendekatan politik ekologi ini adalah salah satu sudut pandang yang bisa di gunakan untuk melihat dan memahami persoalan hubungan manusia dengan lingkungan. Pendekatan ini muncul di era tahun 19970-an, namun baru berkembang sebagai sebuah pemikiran yang baru di Indonesia pada akhir tahun 19980-an. Cara pandang baru ini dalam memahami persoalan lingkungan banyak dipengaruhi pemikiran Neo-Marxian tentang *underdevelopment*, sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan *Malthusian* dan *cultural ecology* sebagai pendekatan yang sistematis selama ini (Arifin, 2012). Oleh karena itu, maka cara pandang politik ekologi lebih menitik beratkan perhatiannya pada analisisnya, dimana bahwa persoalan lingkungan bukan di sebabkan oleh persoalan internal dalam lingkungan tersebut. Persoalan yang muncul atau di munculkan lebih di sebabkan oleh adanya tekanan politik dan ekonomi dari luar lingkungan tersebut. Lingkungan alam tidak kebal dari intervensi luar, khususnya intervensi politik, ekonomi dan politik ekonomi yang memiliki daya lebih besar dari masyarakat setempat.

Menurut sudut pandang yang menggunakan pendekatan politik ekologi, dampak-dampak yang muncul akibat pola dari hubungan manusia dengan lingkungan lebih besar pengaruh dari konstruksi kelompok-kelompok kepentingan tertentu. baik maupun buruk dari hasil relasi manusia dengan lingkungan nya karena adanya *labeling*, *stigma* atau pandangan negatif (etnosentrisme) dari kelompok-kelompok tertentu. Pandangan yang memberi label negatif tersebut kemudian di legitimasi sebagai sebuah kebenaran mutlak. Hal ini bisa terjadi karena pemilik kekuasaan dan otoritas memiliki pengetahuan terkait lingkungan (Kuswijayanti, 2007). Pandangan ini tentu sangat bertolak belakang dengan pandangan kaum ekologi sebelumnya. Kaum ekologi sebelumnya berpendapat bahwa relasi manusia dengan lingkungan alam lebih di sebabkan oleh tekanan dari masyarakat setempat (Internal) seperti tekanan jumlah penduduk yang semakin tidak terkendali (Malthusian), dan persoalan pengelolaan SDA seperti ekstraksi SDA, Konservasi, dll.

Artinya, jika kita memakai sudut pandang kaum Malthusian maka, perkembangan jumlah penduduk harus sejalan dan berbanding lurus dengan ketersediaan pangan, sandang, papan. Apabila jumlah populasi penduduk bertambah melebihi kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka akan terjadi perebutan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Kelaparan, konflik dan lain nya akan terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Hal ini terjadi menurut pandangan kaum ekologi sebelum yakni karena penduduk dan alam sudah tidak seimbang. Ketidak seimbangan jumlah penduduk maka ekstraksi SDA akan makin marak terjadi. Hal seperti wajar terjadi menurut pandangan *cultural ekologi* karena manusia sudah membentuk keseimbangan yang baru dengan alam. Akhirnya manusia mengabaikan keseimbangan yang lama dan menggantinya dengan ekstraksi SDA yang berlebihan dan mengabaikan nilai dan norma yang sudah ada sebelumnya.

Dapat kita pahami, bahwa persoalan lingkungan dalam sudut pandang Malthusian menempatkan lingkungan lah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya dalam pemenuhan energi, maka energi dari fosil sudah tidak mampu memberikan hasil yang memadai dengan kebutuhan masyarakat dengan jumlah anggota keluarga yang sudah bertambah. Oleh karena itu, maka ada cara yang di legitimasi sebagai kebenaran yakni peralihan energi fosil pada energi baru terbarukan. Untuk membangun pembangkit listrik dari energi terbarukan maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan mahal. Oleh karena itu, maka pembangkit listrik energi fosil di beri subsidi agar tetap murah produksinya, sehingga dana yang lain (seperti pajak, inventur dan hutang negara) bisa di arahkan pada pembangunan energi terbarukan tersebut. cara ini sebenarnya tidak memberikan jaminan bahwa pemenuhan energi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan akan bisa tercapai tetapi cara ini di legitimasi yang dibenarkan.

Pandangan politik ekologi bertolak belakang dan mengkritik pandang yang sebelumnya. Kaum ekologi dengan pendekatan politik ekologi, melihat persoalan hubungan manusia dengan lingkungannya bukan karena kepadatan penduduk dan berkurang daya dukung serta tampung lingkungan. Penganut pendekatan politik ekologi melihat bahwa persoalan ini di sebabkan oleh ketidak merata-an dan tekanan yang begitu besar dari pemegang otoritas dan kekuasaan. Oleh karena itu, maka politik ekologi memusatkan perhatiannya bahwa persoalan kerusakan lingkungan tidak di sebabkan murni karena persoalan internal, tetapi lebih cenderung muncul atau dimunculkan oleh faktor tekanan internal dalam skala yang lebih besar. Lingkungan sangat rentan oleh intervensi kekuasaan dan otoritas.

Meminjam wacana (Discourse) yang di kembangkan oleh Michel Foucault (Khozin,2012, Hardiansya, 1012), maka kaum politik ekologi memandang bahwa salah satu permasalahan lingkungan sekarang ini dari faktor eksternal tadi adalah akibat menguat nya wacana (Discourse) energi hijau yakni energi baru terbarukan (EBT). Energi baru terbarukan, konsep energi ramah lingkungan yang di kembangkan oleh para pemilik kekuasaan seperti pemerintah dan kaum industri. Energi baru terbarukan, wacana di munculkan karena untuk melegitimasi kepentingan para pemegang kekuasaan dan otoritas. Wacana di kembangkan dan dilakukan penguatan tentang realitas yang di tampilkan, sehingga melahirkan (Pelabelan) dan menjadi klaim pembenaran (Rahman, 2017, Murray, 2007). Pelabelan tidak lain yakni bertujuan untuk bagaimana realitas diproduksi dan di konstruksi secara sosial sehingga label tadi menjadi miliki bersama. Pelabelan ini yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan otoritas, melalui wacana (Discourse) terkait

persoalan hemat energi dengan energi baru terbarukan akhirnya lebih menekankan aspek membenaran bukan pada aspek kebenaran. Hal itu diperlukan untuk mendukung Kepentingan wacana (Discourse) energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, melalui kebijakan dan atau program membangun pembangkit listrik baru.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sebagai Pembenaran

Energi baru terbarukan adalah istilah yang di kembangkan pemerintah untuk sumber energi yang bisa terbarukan secara alamiah. Potensi energi panas bumi yang besar dan di dukung oleh peraturan yang ada sehingga dimunculkan wacana untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi harus segera di bangun. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Kabupaten Solok menjadi salah satu implementasi wacana tersebut. Pemerintah meyakini bahwa langka ini sebagai langkah strategis untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Pembangunan ini juga akan membawa pemerataan, sehingga semua orang mendapat akses listrik dan kesejahteraan nya akan berangsur meningkat.

Energi panas bumi menjadi begitu menjanjikan, sehingga pemerintah sangat bersemangat membangun pembangkit listrik. Kawasan hutan di Gunung Talang, tepatnya di Nagari Batu Bajanjang akan di bangun sumur eksplorasi panas bumi. Lahan pertanian masyarakat akan di jadikan pusat pengolahan energi panas bumi dan di jadikan areal PLTP. Pemerintah mengklaim, tidak akan ada bentang alam yang di rusak, hutan dan lahan pertanian masyarakat hanya akan terpakai sedikit saja. Sedikit di bandingkan luas keseluruhan hutan dan lahan pertanian masyarakat di Nagari Batu Bajanjang ini.

Pemerintah dan pengembang menjanjikan berbagai bantuan dan kesempatan bagi masyarakat setempat. Bantuan dan kesempatan ini bermacam-macam, mulai dari beasiswa pendidikan untuk anak-anak petani setempat, pelatihan, pendampingan dan bantuan pertanian bagi para petani dan lowongan pekerjaan bagi pemuda-pemudi, semua itu dengan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Menurut pemerintah dan pengembang, mengatakan pada masyarakat lahan pertanian para petani tidak akan mengalami penurunan hasil panen. Ketersediaan air bersih juga akan seperti biasanya, memadai seperti sebelum PLTP ini dibangun.

Menurut masyarakat setempat, pemerintah atau pengembang juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan PLTP Gunung Talang, akan memberi dampak yang baik bagi masyarakat luas. Pemerintah dan pengembang melakukan pemetaan dan penentuan titik eksplorasi agar segera bisa di bangun. Banyak klaim yang di berikan oleh pemerintah dan pengembang, seolah-olah ini memang sebuah kebenaran. Apakah benar pembangunan PLTP ini benar-benar di butuhkan. Apakah benar pembangunan PLTP mulai dari proses hingga menghasilkan listrik serta perawatannya tidak akan merusak lingkungan. apakah benar, di bangun nya PLTP ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sudut pandang politik ekologi, pertanyaan-pertanyaan diatas bukan lah pertanyaan yang mengada-ada. Karena sebuah wacana, penggunaan istilah energi hijau dengan PLTP tidak akan selalu bermakna sebenarnya. Hal ini yang tidak mampu dijelaskan pemerintah dan pengembang sehingga mereka mempertahankan wacana mereka dengan membuat kebijakan yang mendukung mereka. Akan tetapi, tidak semua itu bisa di terima begitu saja oleh masyarakat. Pembangunan PLTP Gunung Talang, menurut masyarakat menyerobot hak-hak adat dan hak

petani. Petani menolak rencana pembangunan tersebut, hal ini karena menurut petani PLTP akan merusak lingkungan dan menurunkan hasil pertanian masyarakat.

Hal ini di sangkal pemerintah, menurut Badan Tenaga Nuklir Indonesia dibandingkan dengan EBT, energi Fossil seperti Batu Bara menurut hasil penelitian memberi dampak yang buruk bagi lingkungan. Energi fossil menghasilkan seperti limbah (CO₂) yang menghasilkan efek rumah kaca dan meningkatkan pemanasan global di bumi. Limbah energi fosil juga menghasilkan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang berdampak pada pencemaran asam. Dampak pencemaran asam bisa mengakibatkan kerusakan sumber air bersih, perikanan, pertanian, iritasi kulit dan merusak struktur bangunan. Pemerintah tidak menunjukkan seberapa aman dampak PLTP bagi lingkungan. klaim pemerintah hanya sebatas wacana untuk membenarkan tindakan mereka tanpa memberi perbandingan yang akurat.

Hal ini membuat masyarakat kecewa, kepentingan masyarakat tidak tercapai. Aksi massa akhirnya dilakukan oleh masyarakat Nagari ini dengan Nagari-Nagari lain di sekitar Gunung Talang. Masyarakat melakukan demo dan penutupan jalan, hingga mengusir pihak perusahaan keluar dari lokasi pertikaian. Masyarakat menuntut pemerintah nagari dan kecamatan setempat untuk tidak mengizinkan pembangunan PLTP berlanjut. Pemerintah setempat tidak berdaya, mereka mengatakan, izin pembangunan PLTP tersebut bukan wewenang mereka.

Aksi demo berlanjut ke kantor bupati Kabupaten Solok, masyarakat mendesak pemerintah membatalkan pembangunan tersebut. Kali ini, masyarakat harus kembali kecewa karena tuntutan mereka tidak bisa di penuhi pemerintah kabupaten. Pemerintah daerah mengatakan bahwa izin pembangunan PLTP tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Saling lempar wewenang terjadi, masyarakat kembali tidak mendapat kepastian. Kondisi memanas, bentrokan tidak terhindarkan sehingga kerugian di kedua belah pihak tidak terelakkan. Korban luka-luka hingga korban material akibat pembakaran kendaraan perusahaan.

Persoalan ini pun akhirnya masuk ke pengadilan, bukan untuk membahas dan meninjau kembali perizinan terkait pembangunan PLTP tetapi masalah kriminal terkait pembakaran kendaraan proyek, penghasutan yang di meja hijaukan. Aksi masa diredam, persoalan baru akhirnya muncul yakni bagaimana masyarakat setempat yang mendukung demo ingin membebaskan beberapa warga yang didakwakan. Wacana baru juga muncul dari perusahaan dan pemerintah. Pengembang dan pemerintah menawarkan jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa warga yang didakwakan di janjikan bisa bebas dengan syarat utama yakni tidak ada lagi aksi massa terkait penolakan pembangunan PLTP. Beberapa warga yang didakwakan tersebut sebagai jaminan nya, jika persyaratan yang di berikan di langgar, maka mereka tadi akan di tangkap kembali.

Tidak solusi konkrit yang di hasilkan, semua kepentingan masyarakat di bungkam dengan membenaran dari wacana yang di bangun oleh pemilik kekuasaan dan otoritas. Masyarakat di berikan pilihan akan tetapi pilihan yang tidak seturut dengan keinginan mereka. Masyarakat di jadikan tidak berdaya, karena dibuat tidak mampu memilih pilihan yang mereka inginkan. Masyarakat di depolitisasi, di hilangkan kemampuan nya untuk menyuarakan hak-hak yang mereka inginkan. Akibatnya, masyarakat setempat di *labeling* sebagai faktor penghambat pembangunan, penghambat kesejahteraan. Masyarakat dianggap tidak tunduk pada negara, dan mengalangi program pemerintah. Sebuah label negatif yang di berikan oleh orang luar, orang-orang pemilik kekuasaan dan otoritas. Labeling merupakan cara mereka untuk menunjukkan bahwa wacana yang mereka konstruksi adalah sebuah membenaran yang harus di terima sebagai

kebenaran. Munculnya pelabelan melalui aktivitas wacana ini, terkadang tidak selalu berdiri sendiri. Faktor kekuasaan yang lebih besar juga ikut mempengaruhi, hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Padahal ini adalah kelemahan mereka, karena tidak mampu memahami kebudayaan masyarakat setempat sebagai mekanisme untuk menstabilkan pembangunan. Kebudayaan adalah mekanisme integrasi dalam pembangunan (Bergendorff, 2007).

Masyarakat di konstruksi dengan wacana yang di bangun oleh orang luar, dengan memberi nilai-nilai sesuai dengan yang mereka inginkan. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah adalah konflik wacana dimana para aktor yang memiliki pengetahuan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi bersaing mempengaruhi publik akan suatu konsep. Adanya situasi dimana informasi terdistorsi oleh kepentingan yang berbeda-beda adalah kondisi yang rawan konflik terlebih karena pihak yang bersengketa telah diliputi oleh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan (*distrust*). Dalam kondisi ini “aktor yang kuat” yakni yang memiliki informasi dan mampu mengolahnya secara intelektual dan berpeluang memenangi perjuangan atas wacana (Discourse) yang diperjuangkan. Pemilik kekuasaan dan otoritas lah di sini yang menjadi aktor yang kuat, karena ia memiliki alat-alat/lembaga-lembaga untuk membuat pembenaran atas tindakan yang ia lakukan seperti Undang-Undang dan kebijakan.

Hal ini juga di dukung oleh kekuasaan yang lebih besar. Bagaimana kapitalisme dunia, justru mempersoalkan kelangkaan energi fosil dan harus beralih segera ke energi terbarukan. Sementara mereka sendiri juga masih melakukan ekstraksi SDA namun dengan wajah yang lebih ramah. Ekspansi perkebunan, peternakan, konsumen BBM fosil, kerja sama ekonomi yang semuanya menghasilkan limbah yang merusak lingkungan baik di dalam negaranya sendiri maupun di negara lain. Oleh karena itu, wacana seperti ini sering diisukan sebagai cara-cara untuk menguasai pasar (seperti energi terbarukan di Indonesia), Di ciptakan citra seolah-olah mengentaskan kemiskinan untuk menguasai masyarakat, padahal ada kepentingan lain di baliknya.

Politik Ekologi dan Keadilan Sosial

Di munculkan nya wacana tentang energi baru terbarukan dalam kasus ini yakni PLTP di tengah masyarakat, membuat persoalan lingkungan tidak selalu memuat substansi yang sesungguhnya. Substansi sering tertutupi oleh citra yang memukau dari penguasa. Artinya, persoalan wacana lingkungan khususnya program pemerintah untuk membangun PLTP harus dicermati dengan lebih bijaksana dan sangat teliti. Apakah memang tujuannya sejalan dengan maksud program itu di adakan atau hanya sebagai pengesahan atas tindakan yang akan mereka lakukan selanjutnya.

Akan menjadi persoalan yang lebih runyam nantinya, jika sebuah wacana di terima dan di jadikan milik publik sebagai sebuah kebenaran padahal sebenarnya itu hanya sebuah pembenaran saja. Masuknya sebuah wacana sebagai kebenaran dalam sebuah masyarakat akan membuat masyarakat tersebut dalam ketidakpastian dan penguasaan terselubung berkepanjangan. Apa yang telanjur mereka anggap kebenaran tidak memberi dampak pemenuhan energi ramah lingkungan, melestarikan lingkungan dan bahkan tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Masyarakat yang termakan wacana pembenaran tersebut akan terus kuasai dan dirugikan berkepanjangan oleh kelompok yang mengumpulkan pundi-pundi keuntungan dari kondisi tersebut. Mereka akan tetap tenang dan membiarkan masyarakat berada dalam kekacauan dan mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Para ahli politik ekologi, berpendapat bahwa persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini yang membuat berbagai persoalan ekologi. Persoalan lingkungan muncul atau di munculkan oleh penguasaan kelompok pada kelompok lainnya. Penguasaan dilakukan oleh pemilik kekuasaan dan otoritas, membuat masyarakat/kelompok tidak berdaya untuk seturut dengan keinginannya. Masyarakat diintervensi melalui beragam alat-alat/lembaga-lembaga kekuasaan.

Oleh karena itu, muncul persoalan-persoalan lain yang membuat tekanan pada lingkungan makin tinggi. PLTP dibangun tetapi izin pembangkit listrik non energi baru tetap di beri izin. Kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, pencemaran air, pemanasan global, kerentanan pangan dan kemunculan penyakit baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Hal ini karena memburuknya kondisi lingkungan dan makin tingginya tekanan pada lingkungan. Memaksa masyarakat mengkonsumsi produk-produk kapitalis agar dapat menikmati keuntungan dari eksploitasi lingkungan. Secara tidak sadar memperluas dan memperkuat pasar kapitalisme dan mengubah gaya hidup masyarakat menjadi ketergantungan.

Contoh kasus diatas, menunjukkan bagaimana wacana dipaksakan menjadi kebenaran, sehingga memberi dampak negatif pada masyarakat walaupun mereka usah menolak wacana tersebut. Masyarakat di beri label negatif karena tidak kooperatif mendukung program pembangunan pemerintah. Masyarakat diintervensi melalui media, hukum sebagai orang terbelakang karena menentang pembangunan. Masyarakat di anggap tidak mampu memahami tujuan pemerintah sehingga terjadi perselisihan. Sebaliknya, para aktor yang menciptakan wacana tersebut justru tercapai keinginannya di balik menguatnya wacana yang mereka bangun. Hal ini karena akan semakin terbukanya peluang bagi mereka untuk melanjutkan kepentingan tujuannya yakni membangun PLTP dan menciptakan komoditas listrik bagi kepentingan ekonomi. Begitu seterusnya hingga muncul komoditas energi terbarukan lagi yang bisa diperebutkan. Hal ini menunjukkan dampak yang di hasilkan oleh sebuah wacana lingkungan. Bukan hanya melahirkan keseimbangan alam dan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga masyarakat sejahtera, tetapi ketidakadilan dan kelas-kelas sosial yang muncul atas kelompok dominan dengan kelompok yang di dominasi.

KESIMPULAN

Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebagai sebuah wacana tidak menuntut adanya pengakuan akan kebenaran dari aktivitas yang mereka lakukan dan produk yang di hasilkan. Wacana pembangunan PLTP lebih fokus pada upaya melakukan pembenaran pada tindakan yang akan ia lakukan. Pembangunan PLTP sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian alam yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat bisa kita temukan pada banyak tempat. Wacana ini bisa kita temukan pada pemerintah (negara maupun dunia), LSM (lokal maupun internasional), pengusaha/investor dan bahkan di kalangan pemikir.

Oleh sebab itu, maka persoalan pembangunan PLTP sebagai legitimasi atas pemenuhan kebutuhan dan kelestarian lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ini perlu disikapi dengan lebih serius. Wacana tidak hanya bicara mencapai kepentingan saja tetapi berpotensi untuk melahirkan kekerasan. Meminjam pemikiran Bourdieu, kekerasan ini berlangsung halus dan bahkan tidak disadari sama sekali. Istilah Bourdieu yakni kekerasan simbolik. Artinya, upaya penyadaran komunitas/masyarakat dari dampak negatif yang di timbulkan wacana yang di kembangkan oleh kelompok tertentu, patut disikapi dengan bijaksana dan saksama. Salah satunya dengan pemikiran politik ekologi bisa dilakukan dengan memberi kesadaran kritis untuk mampu mempertanyakan keindahan, kemudahan dan kenikmatan palsu yang tampil melalui wacana di hadapan kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, 2012. *Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran*, dalam Jurnal Mamangan. Vol 1, hal 11-12
- Arifin, Zainal, Sidarta Pujiraharjo & Fajri Rahman, 2005. *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Padang. Laboratorium Antropologi, FISIP, Universitas Andalas
- Bergendorff, Steen. 2007. *Cultural Complexity and Development Policy*. The European Journal of Development Research, Vol. 19, No.2, Hal. 195-209.
- Hardiansyah A, 2012. *Seni Disiplin Tubuh Dalam Perspektif Michel Foucault*. Jurnal Substania, Vol. 14, No. 1
- Khazin Af, Abdullah, 2012. *Konsep Kekuasaan Michel Foucault*. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 11
- Kuswijayanti, Elisabet Repelita, 2007. *Krisis-Krisis Sosio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi*. *Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 1, Hal. 41-66
- Li, Tania Murray, 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peluso, Nancy Lee, 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat (Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa)*. Yogyakarta : Konphalindo
- Rahman, Noer Fauzi, 2017. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Agraria Indonesia*. Insist Press: Yogyakarta